
EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA AMBUAU TOGO KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON

Oleh

Laode Muhammad Arsal¹, Wa Ode Arsyiah², Jasir.B³, La Ode Dwiyan Pramono
Darmin⁴, Ilham⁵, Sumarliani⁶

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

^{2,3,4,5,6,7}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Email: ¹laodemuhamadarsal@gmail.com, ²arsyiahwaode@gmail.com,

³dwiyan@unidayan.ac.id

Article History:

Received: 12-06-2025

Revised: 03-07-2025

Accepted: 15-07-2025

Keywords:

Evaluasi Program,
Kebijakan, BLT

Abstract: Program bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin atau yang biasa dikenal dengan istilah BLT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Melalui program bantuan langsung tunai diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga miskin. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana tujuan dari program BLT telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program ini secara teknis sudah berjalan tetapi efektivitas dari segi dampak dan pencapaian tujuan dinilai belum maksimal, ditunjukkan dengan nominal bantuan (Rp 300.000 per bulan) belum mencukupi kebutuhan dasar. Pada indikator efisiensi menunjukkan upaya yang dilakukan hanyalah peralihan penyaluran bantuan menggunakan transfer rekening namun demikian indikator efisiensi dinilai belum optimal, ditunjukkan dengan adanya masyarakat dan tokoh masyarakat yang memandang bahwa upaya tersebut hanya formalitas, tanpa ada tindak lanjut atau sosialisasi lanjutan ada upaya khusus lainnya. Pada indikator kecukupan belum optimal, ditunjukkan dengan hasil kebijakan yang dicapai belum bisa memecahkan masalah yang ada. Pada indikator pemerataan belum optimal, ditunjukkan dengan adanya keraguan terhadap akurasi kategori penerima. Pada indikator responsivitas belum optimal, ditunjukkan dengan

belum tercapainya kepuasan masyarakat terhadap bantuan langsung tunai. Pada indikator ketepatan dinilai sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan manfaat atau nilai program yang telah dirasakan masyarakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks sehingga menjadi fokus utama dalam pembangunan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, tingkat kemiskinan nasional Indonesia menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2023, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan akibat dampak pandemi Covid-19. Persentase kemiskinan tercatat sebesar 9,78% pada tahun 2020, naik menjadi 10,14% pada 2021, lalu menurun menjadi 9,54% di tahun 2022, dan kembali turun menjadi 9,35% pada tahun 2023. (Septa, 2025)

Penanganan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak efektif akibat ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh data yang kurang akurat. Bantuan sosial, sesuai Perpres No. 63 Tahun 2017, ditujukan bagi masyarakat miskin dalam bentuk uang, barang, atau jasa, untuk mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Bansos juga memiliki dimensi sosial dan politik yang luas. Tujuan jangka pendeknya adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, sedangkan jangka panjangnya untuk mengatasi kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program BLT merupakan salah satu bentuk bantuan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga miskin.

Penelitian Riska Firdaus dan Burhanuddin (2022) menunjukkan bahwa bantuan sosial di Desa Cimpu belum mampu memberdayakan masyarakat karena penerima cenderung bergantung pada bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori evaluasi kebijakan, namun hanya menilai tiga indikator evaluasi, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan enam indikator menurut Dunn.

Penelitian Ayuni Putri Anggraeni dan Alih Aji Nugroho (2022) mengungkapkan bahwa meski tingkat kepuasan terhadap PKH tinggi, penerima masih terbatas dan terdapat penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan teori evaluasi kebijakan Langbein, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori Dunn.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sempat terjadi keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), di mana bantuan tidak disalurkan kepada penerima manfaat hampir selama satu tahun penuh. Lambatnya respons dari pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat menyebabkan warga melaporkan permasalahan tersebut langsung ke Inspektorat Kabupaten Buton. Selain itu, program ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain terdapat penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria atau berasal dari keluarga yang tidak tergolong rentan, serta adanya masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak terdata sebagai penerima. Ketimpangan ini memicu kecemburuan sosial antarwarga. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sebagian besar disebabkan oleh akurasi data yang rendah. Sistem pendataan yang bersifat sentralistik dan minim partisipasi masyarakat lokal melemahkan proses verifikasi

dan validasi data, sehingga memunculkan ketidaksesuaian dalam implementasi program. Ditinjau dari aspek kecukupan, program BLT dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara optimal, sehingga belum sepenuhnya memenuhi harapan kelompok sasaran.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton"

LANDASAN TEORI

Konsep evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Dewi (2011) istilah evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dunn dalam Zakirin (2022) dalam menentukan kriteria evaluasi terdapat 6 (enam) indikator yang penting untuk diketahui, yakni antara lain efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Konsep Kebijakan Publik

Anderson dalam Maudi dkk (2016) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Sementara itu, Aminullah dalam Anggara (2014) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Konsep Bantuan Sosial

Berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2017 bantuan sosial ialah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu, ataupun masyarakat rentan terhadap resiko sosial, dimana bantuan yang diberikan berupa uang, barang, ataupun jasa dimana bantuan sosial ini merupakan program yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jdih dalam Agustin (2022)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah Jenis kualitatif deskriptif. Sugiyono dalam Noor (2011) mengemukakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat *post positivisme*, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus kepada kondisi obyek yang alamiah.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Waktu penelitian di lakukan dari Bulan April -i Juni 2025.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Informan

Dalam penelitian ini melibatkan 6 informan yang terdiri Eni Firnawati sebagai Bendahara Desa, La Herdin Sebagai Wakil Kepala Ketua BPD, La Wia sebagai Tokoh Masyarakat, Jaliati Sebagai Masyarakat, La Mudi Sebagai Masyarakat, Lisi Yanti Sebagai Masyarakat.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam Noor (2011), analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif meliputi empat tahap utama:

1. Pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam.
2. Reduksi data, yaitu penyederhanaan dan pemilihan data penting berdasarkan fokus penelitian.
3. Penyajian data, dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi, grafik, atau tabel agar memudahkan pemahaman dan analisis.
4. Penarikan kesimpulan, dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan mencari pola, hubungan, dan makna dari data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan pemerintah berupa uang tunai yang bersumber dari dana desa, ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020, penentuan penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah desa (Astuti & Zubaedah, 2023). Meskipun bertujuan positif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah seperti ketidaktepatan sasaran dan rendahnya kepuasan penerima, sehingga efektivitas program perlu dievaluasi. Penelitian ini menilai BLT berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan dari Dunn (2003): efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya selain itu efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas memiliki hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah tercapai. Dengan kata lain adalah hubungan antara output yang ada dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam artian apakah program bantuan sosial terkhusus BLT telah sesuai dengan apa yang tertera dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil kecendrungan wawancara dari 6 informan menyatakan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah berjalan, namun tujuannya belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh nominal bantuan yang dinilai tidak memadai untuk mencukupi seluruh kebutuhan dasar penerima manfaat. Meskipun demikian, bantuan

tersebut masih dirasakan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara teknis telah berjalan, namun tujuan utamanya belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh nominal bantuan yang dianggap belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat. Meskipun terbatas, bantuan tersebut tetap memberikan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum mampu menjamin kesejahteraan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa program ini telah berjalan namun efektivitas dari segi dampak dan pencapaian tujuan dinilai masih rendah. Program yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat faktanya belum bisa memenuhi semua kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat dalam sebulan.

Efisiensi

Efisiensi merujuk pada upaya mencapai tujuan secara optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, baik dalam hal biaya, waktu, maupun tenaga. Menurut Dunn (2003), kebijakan yang mampu mencapai hasil maksimal dengan pengeluaran minimal dikategorikan sebagai efisien. Konsep ini juga berkaitan dengan rasionalitas ekonomi dan bertujuan untuk mencegah pemborosan atau kerugian yang tidak perlu.

Berdasarkan hasil kecenderungan wawancara dari 6 informan menyatakan bahwa pelaksanaan BLT mencakup musyawarah desa dan penyaluran dana melalui rekening. Namun, musyawarah bersifat formalitas tanpa sosialisasi lanjutan, dan tidak ada upaya tambahan selain transfer dana, sehingga partisipasi dan pemahaman masyarakat masih rendah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan BLT sejauh ini terbatas pada penyelenggaraan rapat yang melibatkan sebagian masyarakat serta pengalihan mekanisme penyaluran dana melalui transfer rekening bank, yang memberikan fleksibilitas bagi penerima untuk menarik dana kapan saja. Namun, belum terdapat langkah strategis lainnya, seperti pemanfaatan sumber daya lokal yang terintegrasi dengan program bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BLT secara administratif telah berjalan, ditandai dengan adanya musyawarah desa dan penyaluran dana melalui rekening bank. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat formalitas, minim sosialisasi, serta tidak disertai upaya strategis tambahan seperti pemanfaatan sumber daya lokal. Akibatnya, partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program masih rendah, dan tujuan pemberdayaan melalui BLT belum tercapai secara optimal.

Kecukupan

Menurut Dunn (2003), kecukupan dalam kebijakan publik tercapai ketika tujuan kebijakan berhasil memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada. Kriteria kecukupan menekankan hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diinginkan. Secara ideal, program bantuan sosial seperti BLT bertujuan membantu masyarakat miskin atau rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jika kebijakan ini berhasil, diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kecendrungan wawancara dari 6 informan menyatakan bahwa tujuan yang diharapkan dari program bantuan sosial, seperti BLT, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat serta pembukaan peluang usaha kecil. Namun, dalam praktiknya, besaran bantuan yang diberikan dinilai masih terlalu kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan agar distribusi BLT dapat lebih merata dan tepat sasaran, sehingga dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan secara optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, lambatnya proses implementasi, serta tidak tercapainya tujuan utama program. Program ini juga belum mampu menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan secara umum. Laporan dari sejumlah penerima manfaat menunjukkan bahwa kondisi mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah mengikuti program, yang mengindikasikan bahwa strategi pelaksanaan dan intervensi yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran.

Aspek kecukupan dampak di simpulkan bahwa belum begitu dirasakan oleh para penerima manfaat. Baik pemerintah desa maupun masyarakat mengaku program ini masih jauh dari target dan harapan yang diinginkan, sehingga belum bisa memenuhi semua kebutuhan beberapa pihak serta memecahkan masalah. Dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap aspek kecukupan, secara keseluruhan semua pihak pemangku kepentingan menyatakan bahwa keadaan saat ini belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan sehingga aspek kecukupan juga belum terpenuhi.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik merujuk pada keadilan dalam distribusi manfaat program kepada kelompok sasaran. Menurut Dunn (2003), perataan berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial serta distribusi usaha dan akibat antar kelompok masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan menekankan distribusi yang adil agar tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasi. Analisis dimensi perataan bertujuan menilai apakah pelaksanaan dan manfaat program telah berjalan secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil kecendrungan wawancara dari 6 informan menyatakan bahwa Pemerataan penyaluran program dinilai sudah mulai membaik seiring waktu. Data penerima manfaat tersedia di kantor desa, dan penyaluran dilakukan berdasarkan kriteria tertentu guna menghindari kekecewaan di kalangan masyarakat. Kelompok lansia secara umum telah menerima manfaat secara merata, yang dapat diamati dari frekuensi kehadiran mereka saat pengambilan bantuan di bank. Namun, masih terdapat ketidaktepatan dalam pendataan, di mana beberapa penerima tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sementara sebagian yang memenuhi kriteria justru tidak terdata sebagai penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun distribusi sudah mengarah pada pemerataan, akurasi dalam verifikasi data masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil observasi, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aspek perataan. Hal ini terlihat dari pola distribusi bantuan yang mulai mengarah pada kelompok sasaran yang tepat, terutama kalangan lanjut usia (lansia). Sebagian besar penerima bantuan yang terlihat saat proses pencairan di bank

merupakan lansia, menunjukkan bahwa kelompok rentan ini telah menjadi prioritas dalam pendistribusian. Selain itu, data penerima BLT telah tersedia di kantor desa dan digunakan sebagai dasar penyaluran guna menghindari kecemburuan sosial.

Aspek Perataan ini dapat di simpulkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menunjukkan tren positif dalam aspek pemerataan penyaluran, khususnya kepada kelompok lanjut usia (lansia) yang kini menjadi prioritas penerima manfaat. Data penerima yang tersedia di kantor desa telah digunakan sebagai acuan penyaluran guna meminimalkan kecemburuan sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan ketidaktepatan dalam pendataan, di mana terdapat penerima yang tidak memenuhi kriteria serta sebaliknya. Oleh karena itu, meskipun distribusi bantuan sudah lebih merata, peningkatan akurasi dalam verifikasi dan validasi data tetap diperlukan untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan program.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik menunjukkan sejauh mana program mampu memenuhi kebutuhan atau nilai kelompok sasaran. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan. Menurut Dunn (2003), responsivitas penting karena meskipun kebijakan memenuhi kriteria lain seperti efektivitas dan efisiensi, tetap dianggap gagal jika tidak mampu menjawab kebutuhan kelompok yang seharusnya diuntungkan.

Berdasarkan hasil kecendrungan wawancara dari 6 informan menyatakan bahwa hasil yang dicapai saat ini belum sepenuhnya memuaskan, program ini tetap dianggap bermanfaat dan patut disyukuri karena telah memberikan bantuan meskipun belum sesuai dengan harapan. Namun, besaran bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran dinilai masih belum mencukupi, mengingat nominal yang ditetapkan—yaitu sebesar Rp300.000 per bulan—tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar dalam jangka waktu tersebut. Ketentuan nominal bantuan yang telah diatur oleh pemerintah, yang tidak boleh melebihi atau kurang dari Rp300.000, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penerima manfaat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa hampir semua informan mengatakan bahwa aspek kepuasan dalam program ini belum tercapai jika ditinjau dari besaran nominal yang dikeluarkan. Namun, jika dilihat dari aspek ketepatan waktu penyaluran, program ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan walaupun sebelumnya terdapat masalah terkait keterlambatan penyaluran.

Ketepatan

Menurut Dunn (2003) keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai, berguna dan bernilai untuk kelompok sasaran serta membawa dampak perubahan sesuai dengan misi program atau kebijakan tersebut. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program BLT sudah memberikan guna dan juga bernilai bagi masyarakat penerima manfaat. Bantuan yang diterima setiap bulan sebanyak Rp.300.000 memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan dasar tetapi hasil yang dicapai telah memberikan nilai dan guna. Manfaat yang diperoleh masih tergolong minim, meski demikian agar program ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka

kedepannya diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada para penerima bantuan.

Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari program BLT sebanyak Rp. 300.000 dinilai belum bisa mencukupi kebutuhan para kelompok sasaran. Bantuan tersebut belum bisa menutupi sebagian besar kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan dan listrik. Meski demikian, program ini sudah memberikan guna dan manfaat untuk kelompok sasaran karena dianggap sudah membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun belum semua terpenuhi.

KESIMPULAN

Program bantuan ini telah berjalan, namun efektivitasnya masih rendah karena belum mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup penerima manfaat, dan hasil yang dicapai belum cukup untuk menyelesaikan masalah serta mendorong kemandirian masyarakat; meskipun efisiensi mulai ditingkatkan melalui penyaluran via transfer rekening, serta aspek perataan menunjukkan perbaikan dengan dominasi penerima dari kalangan lansia sebagai kelompok rentan, responsivitas masyarakat terhadap program ini masih menunjukkan ketidakpuasan, meskipun nilai atau manfaat program telah mulai dirasakan oleh kelompok sasaran.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam pelaksanaan penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Masyarakat, Perangkat desa, Perangkat BPD, dan Tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini, serta kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustin, L. (2022). Pengaruh Pengangguran, Ipm, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *EKONIKA : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(2), 262. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.2221>
- [2] Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. *Unimal Perss*, 01(01), 1689–1699.
- [3] Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4(2), 39–54. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/529>
- [4] Ferezegia, D. V. (2018). Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>
- [5] I Wayan Tagel Winarta, A. A. G. R. dan I. M. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- [6] Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, & Sri Hadiningrum. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- [7] Laloan, R., Posumah, J., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan

- Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101), 48–53.
- [8] Laurencia Yudi Venezia, A. S. (2021). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 51–58.
- [9] Lisnavernita, M. Y., Akadira, T., Nurliawati, N., & Vivaldi, A. (2024). *Evaluasi Program Bantuan Sosial Lansia Non Potensial di Kota Madiun dengan Model Context Input Process Product (CIPP)*. 7, 366–378.
- [10] Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN UU. No. 13 TAHUN 2011 PADA PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4589. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>
- [11] Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 215–227. <https://doi.org/10.46807/aspresiasi.v11i2.1756>
- [12] Solikaturun, Supono, Masrurroh, Y., & Zuber, A. (1945). Kemiskinan dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70–90.
- [13] Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- [14] Suhendar, D., Endah, I., Siti, S., Nur, J., Lantai, J., Tinggal, T., Kayu, B., Dinding, J., Tinggal, T., & Hujan, A. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR* Oleh *Keywords: Policy Evaluation , Family Hope Program , Prosperous Family PENDAHULUAN* Dalam rangka kemiskinan berbasis. 3.
- [15] Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. (2021). Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.33365/jtk.v15i1.915>
- [16] Wijaya, H., & Susanty, E. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin). *Jurnal Ecoment Global*, 2(1), 40–50. <https://doi.org/10.35908/jeg.v2i1.213>
- [17] Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 5(1), 256–271. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/599>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN